

BAB II

HUBUNGAN BAIK ANTARA ARAB SAUDI DAN IKHWANUL MUSLIMIN

Hubungan baik antara Saudi Arabia dan Ikhwanul Muslimin berlangsung sangat lama, bisa dikatakan terjalin sejak masing-masing keduanya berdiri sebagai kekuatan baru Islam. Raja Abdul Aziz sebagai pendiri Saudi Arabia modern, dan Hasan Al Banna pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin menjadi pembuka pintu aliansi antara dua kekuatan Islam tersebut. Dan hubungan baik itu terjaga hingga SA dipimpin oleh Raja Salman sekarang ini. Meskipun tidak dipungkiri ada masa dimana keduanya berselisih, misalnya disaat SA merasa dikhianati oleh IM dalam keberpihakannya IM terhadap Iran sebagai musuh bebuyutan SA. Namun tindakan tersebut bukan bersumber dari tubuh IM, hanya saja ada pihak-pihak tertentu yang berafiliasi dengan IM.

A. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Arab Saudi

SA dengan stabilitas dan pengaruhnya dapat memainkan peranan penting di tingkat regional dan internasional. SA bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan baik internasional maupun domestik negaranya. SA merupakan kerajaan yang percaya diri dalam mengamati dan menangani permasalahan global dengan tetap memperhatikan masalah dalam negerinya. Semua itu tidak terlepas dari sikap atau kebijakan luar negeri yang diambil. Kebijakan luar negeri SA diambil atas pertimbangan geografis, sejarah, agama, ekonomi, keamanan, prinsip politik dan keadaan aktual.

Dan semua itu berlandaskan pada prinsip-prinsip, diantaranya: kebijakan membangun *good-neighbor*, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, memperkuat hubungan dengan negara Teluk dan Semenanjung Arab, memperkuat hubungan dengan negara Arab dan Islam untuk kepentingan bersama, mengadospi kebijakan non *alignment*, membangun hubungan kerjasama dengan negara sahabat, dan memainkan peranan aktif dalam organisasi internasional dan regional (**Affairs, 2016**). Adapun realisasinya, kebijakan luar negeri SA mengikuti keadaan di beberapa lingkaran keadaan berikut:

1. Lingkaran Teluk

SA berada di wilayah Teluk, dan itu menjadi pertimbangan utama pengambilan kebijakan politik luar negerinya. Hubungan darah, kesamaan historis, lingkungan geografis yang menimbulkan kebersamaan, dan adanya kesamaan dalam sistem ekonomi dan politik dengan negara-negara Teluk lainnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Melalui organisasi atau Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (GCC), negara-negara Teluk bertujuan untuk menyatukan dan mengoordinasikan kebijakan bersama dalam mencegah dan mengatasi timbulnya konflik. Adapun anggota GCC terdiri dari enam negara, yakni Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Oman (Indonesia, 2015).

SA dan negara Teluk lainnya percaya pada kesamaan mereka bisa menyatukan mereka dalam mempertahankan keamanan selama krisis besar dan konflik yang mengelilingi dan mempengaruhi kawasan dengan cara yang berbeda. Para pemimpin negara-negara Teluk setuju bahwa GCC bisa dijadikan media untuk menjalin kerjasama komprehensif dalam bidang politik, kemananan, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan lain-lain.

Kerjasama di atas haruslah berpegang pada landasan-landasan berikut:

- a. Keamanan dan stabilitas kawasan adalah tanggung jawab negara-negara Teluk.
- b. Serikat negara Teluk memiliki hak untuk mempertahankan keamanan dan kemerdekaan negaranya sesuai dengan kebijakan negara dan hukum internasional untuk menghadapi tantangan baik internal maupun internasional.
- c. Menolak intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara Teluk, dan bekerjasama untuk melawan setiap agresi pada salah satu anggota negara.
- d. Memperkuat kerjasama negara-negara Teluk dengan Inggris dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan lain-lain, melalui pendalaman dan konsolidasi hubungan antara negara-negara anggota.
- e. Koordinasi kebijakan GCC bila memungkinkan, terutama terhadap isu-isu penting regional dan internasional. Hal ini telah ditempuh, misalnya dalam perang Irak-Iran dan invasi Irak ke Kuwait.

- f. Mengambil tindakan serius untuk menyelesaikan semua sengketa (terutama sengketa perbatasan) antara negara-negara kawasan melalui pemahaman yang didasarkan pada prinsip persaudaraan dan tetangga yang baik.

2. Lingkaran Arab

Sejak berdirinya SA, kerajaan menyadari pentingnya penyatuan sikap dengan negara-negara Arab. Terdapat 22 negara yang termasuk pada Liga Negara Arab, yakni Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Aljazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, dan Komoro (Dickson, 2011). Persatuan ini didirikan oleh enam negara (Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi dan Suriah) pada tanggal 22 maret 1945. Didirikan dengan tujuan untuk menemukan mekanisme dalam mengoordinasikan hubungan serta sikap terhadap kepentingan dan isu-isu negara tersebut.

Lingkaran Arab ini berjalan dengan prinsip-prinsip dasar, seperti: *pertama*, hubungan yang tak terelakkan antara nasionalisme arab dan Islam. Maksudnya, SA memiliki perbedaan dengan negara lainnya di kawasan Arab, yakni SA menjadi tempat lahirnya Islam dan nasionalisme Arab. *Kedua*, kebutuhan akan persatuan negara-negara Arab. Tujuannya adalah untuk menyatukan sikap Arab dan

memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya masing-masing negara-negara untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, realisme, untuk menghindari pencitraan negatif yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara Arab serta mencegah campur tangan negara lain dalam urusan internal Arab. *Keempat*, komitmen pada prinsip persaudaraan Arab melalui penawaran semua jenis bantuan dan dukungan.

3. Lingkaran Islam

Islam selalu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri SA. Islam sebagai dasar SA, kerajaan bekerja untuk mengabdikan dan mendedikasikan potensi dan sumber dayanya untuk melayani masalah dunia Islam dan mencapai motif solidaritas dan persatuan berdasarkan fakta dari rasa memiliki satu keyakinan (Affairs, 2016). Dengan solidaritas Islam di atas, diharapkan pihak-pihak yang tergabung dapat bekerja dalam mendamaikan perselisihan di antara negara-negara Islam, saling memberikan bantuan ekonomi, memberikan bantuan darurat untuk negara Islam yang terkena bencana, dan memberikan bantuan bagi kelompok-kelompok Islam dimanapun mereka berada.

Demi mencapai solidaritas Islam, SA mengajak negara-negara Islam untuk membangun sistem pemerintahan Islam dan organisasi non pemerintah, yang sudah terbentuk diantaranya: *The Muslims World League* yang didirikan pada tahun 1962 dan *The Organization of Islamic Conference* yang berdiri pada tahun 1969, dan SA menjadi tuan rumah kedua organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri SA di lingkaran Islam adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Mencapai solidaritas Islam yang komprehensif
- b. Membuka cakrawala baru bagi kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam yang bertujuan mendukung pengelolaan potensi dan sumber daya masing-masing negara.

- c. Melawan berbagai jenis dan teknik *overflow* budaya dan invasi intelektual yang mengancam dunia Islam.
- d. Bekerja untuk mengembangkan Organisasi Konferensi Islam dan mendukung kegiatan agar lebih efektif dalam menghadapi isu-isu yang dihadapi oleh dunia Islam.
- e. Mengaktifkan peran-peran negara dunia Islam dalam kerangka tatanan dunia baru. Memberikan bantuan dan dukungan untuk minoritas muslim di seluruh dunia, dan menjaga hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
- f. Memperkenalkan citra Islam yang sesungguhnya dan hukum syariat yang penuh dengan toleransi. Dan melindungi Islam dari semua tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada Islam, seperti terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

4. Lingkaran Internasional

Dalam lingkaran internasional, SA sangat tertarik untuk membangun hubungan yang setara dengan kekuatan besar yang terhubung dengan kerajaan melalui serangkaian kepentingan.

Kepentingan ini muncul sebagai tanda eksistensi SA di negara arab dan Islam. Dan SA keluar dari dua dunia tersebut untuk bergerak lebih luas di tingkat masyarakat internasional. Selanjutnya, SA mendekati pusat-pusat kebijakan internasional dengan mempertimbangkan konsekuensi dan tanggung jawab dari kebijakan tersebut.

Saudi Arabia bangga menjadi salah satu anggota pendiri PBB 1945. Kerajaan percaya bahwa perdamaian internasional merupakan bagian dari kebijakan luar negerinya. Kerajaan selalu mengajak pihak terkait untuk lebih transparan dan berkeadilan dalam segala bidang. Keadilan adalah satu-satunya metode untuk menuju pada kesejahteraan dan stabilitas dunia. Dengan demikian, kerajaan tidak percaya dalam menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melancarkan kebijakan luar negerinya. Pada saat yang sama, kerajaan percaya bahwa pertahanan diri adalah dasar yang sah dalam hukum internasional.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar dan prinsip penentuan kebijakan luar negeri SA adalah :

1. Harmonisasi dengan hukum-hukum Islam (syariat) sebagai konstitusi SA.

2. Menghargai prinsip kedaulatan dan non intervensi ke urusan dalam negeri manapun. Serta menolak intervensi dari negara lain terhadap urusan dalam negeri SA.
3. Bekerja untuk perdamaian dan keadilan internasional, dan menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan atau tindakan yang mengancam perdamaian internasional.
4. Mengutuk dan menolak segala metode dan terorisme internasional, dan mengkonfirmasi bahwa isu tentang Islam adalah teroris hanyalah dugaan yang tidak beralasan.
5. Kepatuhan terhadap hukum, perjanjian, *charter*, dan perjanjian bilateral.
6. Mempertahankan isu-isu arab dan Islam di dunia internasional melalui dukungan terus menerus dengan segala cara baik politik maupun ekonomi.
7. *Non alignment* dan penolakan terhadap sengketa yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Serta menghormati hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak mereka untuk pertahanan diri.

8. Menerapkan kebijakan yang seimbang dalam bidang produksi minyak, sebagaimana SA merupakan produsen minyak dan pemegang cadangan minyak terbesar di dunia.

Selanjutnya, arah politik SA kepada negara lain adalah SA menerapkan politik luar negeri yang agresif untuk memperkuat dominasi dan pengaruhnya serta mencapai hegemoni di Timur Tengah. Kebijakan yang diambil bisa berubah-ubah, contohnya pada krisis di Suriah, awalnya pro Suriah dan seketika berubah menjadi anti Suriah. Begitupun pada kasus kudeta Mursi, awalnya berhubungan baik dengan Mursi dan pemerintahannya, namun seketika mendukung kudeta atas Mursi. Sikap demikian tentu memiliki tujuan dan kepentingan, yakni untuk menekan rezim pemerintahan Mursi. Dengan demikian, tindakan SA dikatakan sebagai “*opportunity*” atau kesempatan dalam melancarkan kepentingannya.

B. Hubungan Arab Saudi dengan Ikhwanul Muslimin

1. Gambaran Umum Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan satu gerakan Islam yang mengajak umat menuju kepada penerapan syariat Islam dalam kehidupan nyata sebagaimana yang termaktub dalam Al Quran dan Al Hadits. IM mengajak umat untuk berkeyakinan bersih yang berakar teguh dalam

hati untuk bekerja dengan Allah dan untuk Allah. Keteguhan tersebut menjadi penggerak penerapan syariah yang mengatur *al jawarih* (anggota tubuh) dan perilaku. Pendiri IM adalah Hasan Al Banna, yang kemudian menetapkan nilai-nilai umum IM yakni *syamil* (universal), *kamil* (sempurna) dan *mutakamil* (integral). IM berdiri di kota Ismailiyyah, Mesir pada tahun 1928 yaitu empat tahun selepas kejatuhan sistem khalifah Islam terakhir, yakni Khalifah Turki Utsmaniyah. Anggaran dasar IM dibuat dan disahkan pada Rapat Umum IM pada 24 September 1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi IM disusun dan pada tahun itu pula, IM membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan Al Mahmoudiya.

Tujuan IM adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga islami, bangsa yang islami, pemerintahan yang islami, negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran islam. Tujuan tersebut memiliki landasan berupa: *Allahu ghayatuna* (Allah tujuan kami), *Ar Rasul Qudwatuna* (Rasulullah teladan kami), *Al Quran Dusturuna* (Al Quran landasan hukum kami), *Al Jihad Sabiluna* (Jihad jalan kami) dan *Syahid fiisabilillah asma amanina* (Mati syahid di jalan Allah cita-cita kami yang tertinggi).

Berikut adalah simbol yang menjiwai jiwa Ikhwanul Muslimin :



Gambar 2.1

Sumber:<http://www.muslimedianews.com/2013/10/allah-rasulullah-dan-ikhwanul-muslimin.html>

Artikel yang ditulis oleh Yaqien (Mahasiswa Al Azhar Kairo)

Adapun terkait nasionalisme yang didegungkan oleh Hasan Al Banna, beliau mengatakan hal berikut (Akbar, 2016) :

“Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah keharusan bekerja keras untuk membebaskan tanah air dari penjajah, mengupayakan kemerdekaannya, serta menanamkan kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putranya, maka kami bersama mereka dalam hal itu. Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah memperkuat ikatan antar anggota masyarakat di satu wilayah dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka kami juga sepakat dengan mereka. Karena Islam menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar. Sesungguhnya Islam tegas-tegas mewajibkan, hingga tidak ada jalan untuk menghindar, bahwa setiap orang harus bekerja untuk kebaikan negaranya, memberikan pelayanan maksimal untuknya, mempersembahkan kebaikan yang mampu dilakukan untuk umatnya dan melakukan semua itu dengan cara mendahulukan yang terdekat, kemudian yang dekat, baik famili maupun tetangga. Sampai-sampai Islam tidak membolehkan memindah pembagian zakat kepada orang yang jaraknya melebihi jarak dibolehkannya mengqasar shalat kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini lebih mengutamakan kerabat dekat dalam berbuat kebaikan.”

Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang kesatuan Islam dan bukti adanya keterikatan bangsa muslim. Khilafah merupakan identitas Islam yang wajib dipikirkan dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Khilafah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan sebagian besar hukum dalam agama Allah. Oleh karena itu, para sahabat lebih mendahulukan penanganan kekhalifahan daripada mengurus dan memakamkan jenazah Rasulullah SAW sampai mereka benar-benar menyelesaikan tugas tersebut (memilih khalifah) (Akbar, 2016).

Pada awalnya, organisasi IM memfokuskan pada kegiatan pendidikan dan sosial, tetapi dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan politik yang besar. Selama bertahun-tahun, IM menyebar ke negara-negara muslim lainnya, termasuk Suriah, Yordania, Tunisia, dan lain-lain, serta negara-negara dimana umat Islam berada dalam minoritas. IM digambarkan sebagaigerakan yang sangat mudah berafiliasi antara satu cabang dengan cabang lainnya (Chamieh, 1994).

Pada November 1948, terjadi pengeboman dan upaya pembunuhan terhadap IM. Pemerintah Mesir menahan 32 pemimpin IM dan resmi menutup IM. Pada saat ini, IM diperkirakan memiliki 2.000 cabang dan 500.000 anggota atau simpatisan (Wright, 1985). Bulan-bulan berikutnya, Perdana Menteri Mesir dibunuh oleh anggota IM dan sebagai balasannya Hasan Al Banna dibunuh oleh anggota pemerintahan.

Setelah revolusi 2011 yang menggulingkan Husni Mubarak, IM disahkan dan muncul sebagai gerakan politik yang paling kuat dan kohesif di Mesir. Partai politiknya memenangkan dua referendum, kursi yang jauh lebih banyak dari pihak lain dalam pemilihan parlemen 2011-2012, IM dengan partainya yang bernama Partai Kebebasan dan Keadilan, memenangkan hampir setengah dari 498 kursi. Dan kandidatnya Muhammad Mursi memenangkan pemilihan Presiden 2012.

IM menegaskan komitmennya untuk bergabung dalam proses politik. Harapannya adalah untuk membangun pemerintahan yang demokratis, negara sipil yang menuju pada kebebasan dan keadilan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang melayani seluruh masyarakat tanpa memandang warna kulit, keyakinan, tren politik atau agama (Godmann, 2011). Namun dalam waktu satu tahun masa jabatan, terjadi protes massa terhadap pemerintahannya dan Mursi digulingkan oleh militer.

Sampai tahun 2016, IM konsisten muncul sebagai kekuatan politik. Pada pemilihan kursi pemerintahan di Yordania, anggota politik IM memenangkan kursi di Parlemen Yordania, perwakilan wanita meningkat jumlahnya di posisi legislatif (Sweiss, 2016). Adapun prinsip politik yang dipegang IM sesuai dengan tiga strategi mencapai kekuatan dari Hasan Al Banna, yakni: tahap propaganda awal (persiapan), tahap organisasi (dimana orang-orang akan dididik oleh

kader IM) dan ‘aksi panggung’ (dimana kekuasaan akan diambil atau disita).

Berikut kami lampirkan bendera partai politik Ikhwanul Muslimin:



Gambar 2.2

Sumber :

http://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/extremismus/IslamismusundsonstigerExtremismus/islamistische_organisationen_und_bestrebungen/muslimbruderschaft_mb/die-muslimbruderschaft-54221.html

2. Hubungan baik Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin

Hubungan baik antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin tidak terjadi begitu saja, melainkan ada alasan yang melatarbelakanginya. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu negara menjalin hubungan baik dengan negara lain, diantaranya adalah: menjaga perdamaian dengan bangsa lain, menjaga hubungan politik

yang lebih dinamis, rasa solidaritas, mengambil pembelajaran positif dari bangsa lain, dan lain-lain (Monica, 2016).

Secara historis, Ikhwanul Muslimin dan Kerajaan Arab Saudi berusia hampir sama. Hasan Al Banna mendirikan IM pada tahun 1928 dan Raja Abdul Aziz mendeklarasikan kelahiran Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Al Banna tertarik pada wahabisme yang dianut SA, sehingga Al Banna selalu diterima di SA. Raja Abdul Aziz adalah inspirasi dari salafisme Al Banna. Sejak 1928, Al Banna membangun kemitraan dengan beberapa tokoh penting Arab Saudi, hingga akhirnya tahun 1936 ia melaksanakan ibadah haji. Di sanalah Raja Abdul Aziz dan Al Banna bertemu, sekaligus menolak permintaan Al Banna untuk membuka cabang IM di SA. Namun, upaya IM untuk bermitra dengan SA menjumpai titik keberhasilan. Pada tahun 1945, kunjungan Raja Abdul Aziz ke Mesir disambut meriah oleh aktivis IM. Pemicu hubungan baik ini adalah dengan menggunakan isu Palestina sebagai pintu membuka aliansi.

Hubungan baik tetap terjaga pada era kepemimpinan Hasan Hudhaibi, SA menjadi mediator konflik antara IM dan Gamal Abdul Nasser. Ketegangan itu terjadi tahun 1956, dimana pemerintahan Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir kedua periode 1956-1971) melarang dan membubarkan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Waktu itu terjadi penangkapan besar-besaran dan hukuman mati terhadap anggota dan pimpinan IM. Para anggota dan tokoh Ikhwan dimasukkan ke penjara

militer di Liman Thuroh. Mereka mengalami penyiksaan, sebelum akhirnya dihukum mati. Sebagian dari mereka ada yang melarikan diri. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Arab Saudi menampung pelarian jamaah Ikhwanul Muslimin Mesir tersebut seperti Abdullah Azzam dan Muhammad Qutb. Selanjutnya, mereka tidak hanya dipekerjakan sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi, tetapi juga pemerintah Arab Saudi memberikan mereka kewarganegaraan dan kewenangan untuk mengurus beberapa lembaga swadaya masyarakat Arab Saudi. Inilah titik penting hubungan harmonis antara Arab Saudi dan IM.

Hubungan baik di atas dilatarbelakangi oleh alasan solidaritas, kedekatan ideologis politis dan menjaga perdamaian antara bangsa. Dimana Arab Saudi peduli terhadap korban aksi pembubaran IM di Mesir. Tindakan seperti memberikan bantuan dianggap sudah semestinya dilakukan atas dasar rasa solidaritas sesama muslim. Dan juga untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Sehingga, tidak ada kekhawatiran apapun dari SA atas tindakannya. Untuk alasan kedekatan ideologis politis, saat IM berkonflik dengan Nasser, baik IM maupun SA menentang ideologi dan kebijakan politik Nasser. Maka tidak heran jika banyak aktivis IM yang eksodus ke SA saat rezim Nasser berlangsung. Alasan menjaga perdamaian antar bangsa dapat juga dilihat dari sambutan baik Raja Abdullah terhadap kunjungan Muhammad Mursi ke SA sesaat setelah terpilih menjadi Presiden Mesir.

Hubungan baik antara keduanya berlanjut pada dukungan materil SA kepada IM. Sejak awal tahun 1936, Wakil Menteri Keuangan Muhammad Srour Al Farhan di bawah perintah Raja Abdul Aziz konsisten memberikan bantuan rutin kepada IM. Hubungan baik itu berlanjut meskipun hubungan SA dan Mesir mengalami perubahan saat periode Raja Farouk, namun hubungan SA dan IM tetap terjaga. Hasan Al Banna diizinkan untuk memberikan ceramah selama musim haji di Makkah dan Madinah, berkhotbah kepada Kepala Delegasi negara-negara muslim, dan juga bertemu dengan ulama-ulama. Pada tahun 1946, Raja Saudi mengadakan pesta untuk menghormati pemimpin IM (Sadeq, 2015). Dan sekitar tahun 1966, IM berhasil membuka cabangnya di SA serta negara Teluk lainnya.

Berlanjut pada hubungan SA dan IM era Muhammad Mursi, sesaat setelah terpilihnya Mursi sebagai Presiden Mesir, SA adalah negara pertama yang dikunjungi Mursi. Alasannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara keduanya. Seperti yang diketahui bahwa Mursi merupakan presiden dari kalangan IM. Sehingga, tindakannya untuk mengunjungi Mesir pada Juli 2012 silam adalah untuk mempererat hubungannya dengan SA. Tanggapan SA atas kunjungan tersebut pun baik.